

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO
Jl. RA. BASOENI No.35 Telp. (0321) 322814
MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah** Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud, dilaksanakan pada akhir Tahun Anggaran 2021 dan didalamnya disajikan data dan informasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yang dibiayai dari APBD Tahun 2021 sebagaimana terangkum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dengan berpedoman pada pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD di Pimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara Teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

. Selanjutnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 ini, diharapkan dapat menunjukkan eksistensinya selaku dokumen pertanggung jawaban dan sumber informasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Sekretariat DPRD selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, serta menjadi bahan acuan untuk tahun mendatang.

Mojokerto, Pebruari 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MOJOKERTO

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH..
Pembina Utama Muda
NIP. 1967 198903 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, OPD menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD / Renstra OPD, RKPD / Renja OPD, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.
2. Sebagai pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
3. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

2. Landasan Hukum

- a. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.



- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja ini adalah sebagai informasi pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto untuk menilai keberhasilan dan memberikan gambaran dalam penyajian data kuantitatif maupun kualitatif tentang perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

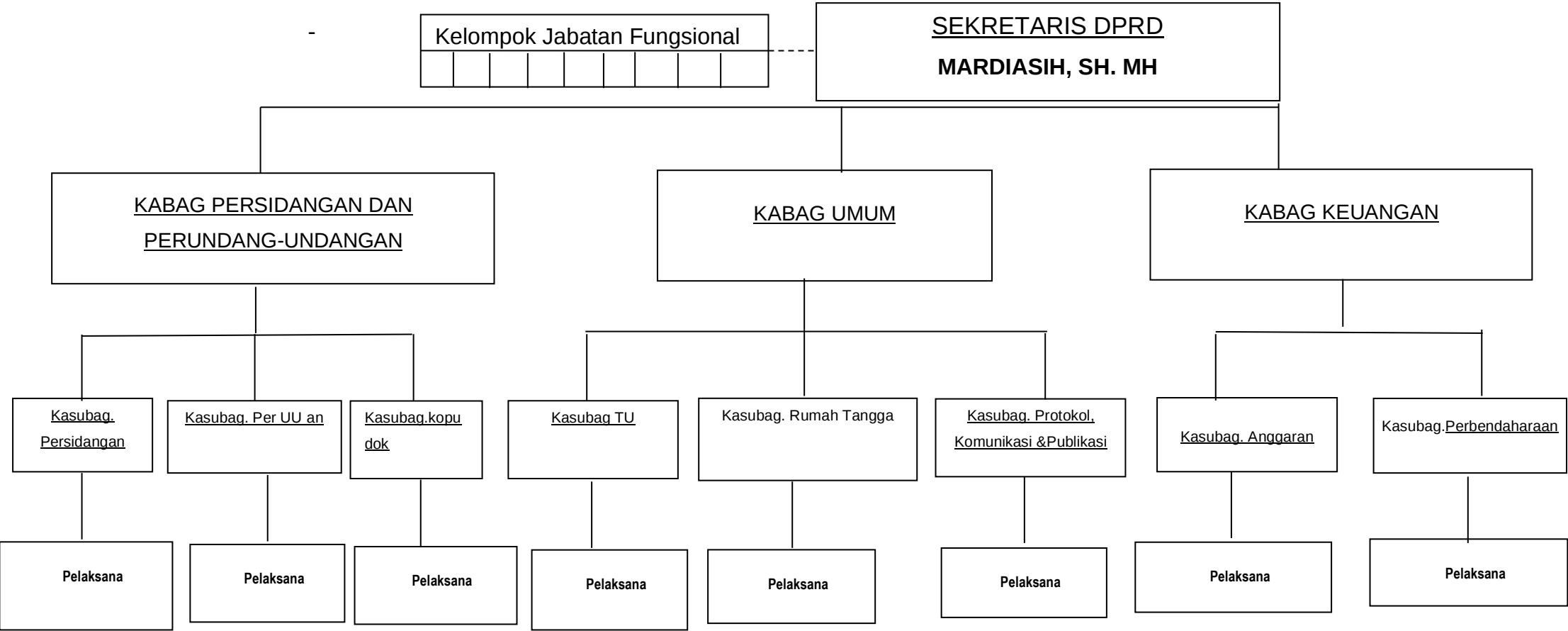
4. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

1. Struktur organisasi



a. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan pelaksanaan urusan/kewenangan, Sekretariat DPRD Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto mempunyai fungsi :

a. SEKRETARIS DPRD

1. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak fungsinya sesuai dengan kebutuhan
2. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi :
 1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan
 4. Menyediakan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

b. BAGIAN UMUM

Bagian Umum mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program;
2. Melaksanakan, pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan , kerumahtanggan, perjalanan dinas dan protokol
3. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan dan ;
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD;

Bagian umum mempunyai sebagian tugas Sekretaris DPRD meliputi :

a. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas;

1. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian:
2. Melakukan pengelolaan surat menyura, kearsipan, ketatausahaan dan kepegawaian



3. Merancang perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
4. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian umum

b. Sub bagian Rumah Tangga

Sub bagian Rumah tangga mempunyai tugas :

1. Melakukan pengelolaan kerumahtanggaan
2. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
3. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bagian Umum

c. Sub Bagian Protokol mempunyai tugas :

1. Melakukan keprotokolan DPRD :
2. Menyusun informasi/bahan publikasi hasil kegiatan DPRD
3. Melakukan pemeliharaan keamanan di lingkup Sekretariat DPRD
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Umum

C. BAGIAN KEUANGAN

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi perbendaharaan dan anggaran dalam melaksanakan tugas bagian keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan anggaran
- b. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan.

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Anggaran mempunyai tugas :
 1. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kegiatan anggaran Keuangan
 2. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan
 3. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
 4. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Keuangan
- b. Sub. Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :
 1. Memproses administrasi dan melakukan pembayaran kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD
 2. Memproses administrasi dan melakukan pembayaran gaji, tunjangan dan perjalanan dinas DPRD dan Sekretariat DPRD



3. Menyusun laporan keuangan
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
5. Melakukan tugas-tugaskedinasan lain yang diberikan oleh Kepala bagian Keuangan

D. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD meliputi persidangan dan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD;
2. Perumusan risalah rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD;
3. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan produk hukum lainnya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan tugas-tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

a. Sub. Bagian Persidangan

1. Menyusun jadwal kegiatan rapat Paripurna, rapat-rapat DPRD, kunjungan kerja
2. Pimpinan dan Anggota DPRD;
3. Menyusun bahan rapat paripurna, rapat-rapat DPRD dan kunjungan kerja serta mendistribusikannya
4. Menyusun risalah rapat paripurna dan rapat-rapat DPRD
5. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan ;
6. Melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian
7. persidangan dan perundang-undangan.

b. Sub. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

1. Menyusun dan memproses bahan perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
2. Menyusun produk DPRD
3. Melakikan fasilitasi perundang-undangan dan produk hukum lainnya;
4. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan dan ;
5. Melakukan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian persidangan dan perundang-undangan.

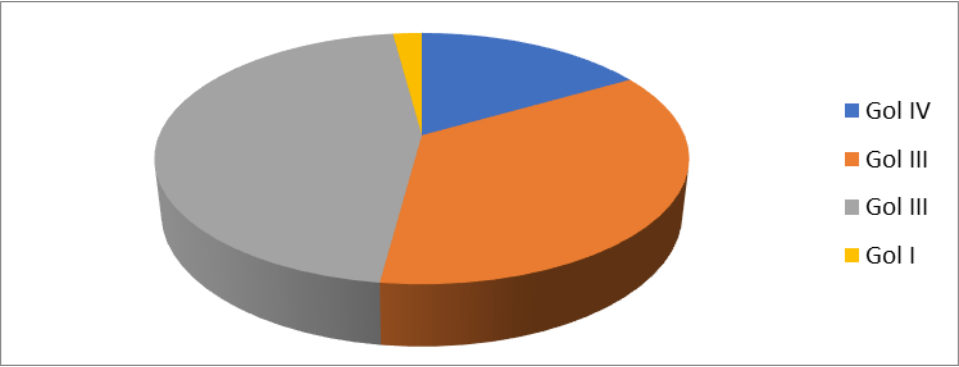


Tabel 1

Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Pendidikan								TOTAL
		S3	S2	S1	D-IV	D-III	SMA	SMP	SD	
1	IV/c									
2	IV/b		4							4
3	IV/a		3							3
	Total Gol IV		7							7
4	III/d			3						3
5	III/c		1	3						4
6	III/b			7						7
7	III/a			2						2
	Total Gol III		1	16			1			16
8	II/d						2			2
9	II/c						2			2
10	II/b									
11	II/a									
	Total Gol II						2			4
12	I/d									
13	I/c									
14	I/b									
15	I/a									
	Total Gol I									
Jumlah Total										



Gambar 1

Tabel 2

Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD
Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	THL
1	Laki-Laki	12	14
2	Perempuan	15	9
	JUMLAH	27	23

1) Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto didukung oleh sarana sebagai berikut :

- a. Gedung kantor DPRD Kabupaten Mojokerto terletak di Jalan RA Basoeni No. 35 Mojokerto.
- b. Sarana kantor terdiri dari 13 (tiga belas) unit kendaraan dinas roda 4, 14 (empat belas) unit kendaraan dinas roda 2, mebelair kantor, computer, printer serta peralatan kantor dan rumah tangga.

Tabel 3

Data Gedung Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

Uraian	Jumlah barang	Nilai
Tanah		
Kantor	-	-
Rumah Dinas	-	-
Bangunan		
Kantor	1unit/1.205,66 m2	Rp. 361.696.000,-
Rumah Dinas	-	-
Ruangan		
• Ruang Kerja Sekretaris	(1 ruang)	
• Ruang Kerja Kepala Bagian	(3 ruang)	
• Rang Kerja staf	(2 ruang)	
• Ruang sidang utama	(1 ruang)	
• Ruang Fraksi-fraksi	(7 ruang)	
• Ruang Sidang Komisi	(4 ruang)	
• Ruang sidang Badan Kehormatan	(1 ruang)	
• Ruang Sidang Badan Legislasi	(1 ruang)	
• Ruang Pimpinan	(4 ruang)	
• Ruang Tunggu Tamu	(1 ruang)	
• Kamar Kecil	(7 ruang)	
• Ruang Aspirasi Masyarakat	(1 ruang)	
Jumlah	31 ruang	
Kendaraan		
Roda 4	10 unit	
Roda 2	14 unit	
Jumlah	24 unit	
Barang Investaris Lainnya		
Meja Sidang Dewan	41 meja	
Kursi Sidang Dewan	126 kursi	
Kursi Lipat	186 kursi	
Meja Kursi Tamu	19 set	
Kursi Kerja	6 buah	
Meja Kerja	60 buah	
Meja kursi Pimpinan DPRD	5 set	
Kursi Sekretaris DPRD	3 set	

Meja Kursi Kepala Bagian	3 buah	
Mesin Ketik	2 buah	
Komputer	12 unit	
Laptop	23 unit	
Infokus	4 unit	
Pesawat TV	14 unit	
Pesawat Telp	7 unit	
AC Ruangan	39 unit	
Kamera	6 unit	
Sound System	2 set	
Printer	33 buah	
Handycam Sony	1 unit	
Papan Visual	2 unit	
Almari Arsip	4 unit	
Iphone PABX	4 unit	
Genset	1 unit	
Podium	1 buah	
Meja rapat	66 buah	
Almari	27 buah	

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2016 yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun 2016.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk dapat digunakan sebagai bahan pelaksanaan perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1. Idiil : Pancasila;
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
 - a. Tap MPR No. IV / MPR/ 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004;
 - b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - c. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Pearturan menteri perdangan aparatur negara + Reformasi birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 - g. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/458/416-050/2009 tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2019
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto.

LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Lingkungan strategis sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi, begitu juga tentunya dengan pada Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto, yang jika di analisa secara SWOT dapat berupa faktor internal dan eksternal, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat diidentifikasi :

1. Faktor Internal
 - a. Strenght/Kekuatan :
 - Adanya jumlah pegawai yang cukup;
 - Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
 - Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
 - Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

b. Weakness/Kelemahan :

- Masih belum maksimalnya motivasi kerja aparatur;
- Masih belum optimalnya koordinasi internal pada aparatur sekretariat.

2. Faktor Eksternal

a. Oppurtunities/Peluang :

- Adanya hubungan kerja yang harmonis antara instansi terkait;
- Adanya kesempatan mengikuti Diklat/bimtek bagi pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Adanya wadah Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupten/Kota Seluruh Indonesia (Asdeksi);
- Adanya rapat koordinasi secara periodik antar pimpinan SKPD dengan Pimpinan Daerah.

b. Threats/Ancaman :

- Adanya tuntutan kinerja diluar tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kab. Mojokerto
- Adanya perbedaan kebijakan para anggota legislatif
- Adanya tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi terhadap peranan Lembaga Legislatif.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam penyusunan perencanaan kinerja Sekretariat DPRD mengacu pada target kinerja yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021, sesuai dengan kewenangan Sekretariat DPRD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan gambaran umum dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam 5 tahun. Secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

- Tujuan

Dalam Rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, maka harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan terukur dalam Rumusan Strategi Organisasi.

Tujuan merupakan hasil yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan menfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian Misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut : **“Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik”**.

- SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin di capai melalui tindakan- tindakan yang akan dilakukan secara oprasional rumusan sasaran yang ditetapkan dengan harapan dapat memberikan fokus pada penyusunan program oprasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tuban menetapkan sasaran yang ingin dicapai adalah : **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD”**

Sasaran dan Indikator Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan DPRD	-	-	64	65	65	70

2. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan perjanjian kinerja sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja Sekretariat DPRD dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran strategis. Setelah target kinerja ditetapkan, kemudian pada akhir tahun berjalan dilakukan pengukuran terhadap kinerja sasaran tersebut. Hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam LKjIP Sekretariat DPRD tahun 2021. Perjanjian kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2021. Perjanjian kinerja perubahan Sekretariat DPRD tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2021
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Terhadap Peran DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Kesekretariatan DPRD	70



2.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelayanan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Opini atas LKPD	WTP
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kategori Baik

PROGRAM		ANGGARAN		KETERANGAN
1.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	32.516.698.000,00	PAPBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	46.258.205.607,00	PAPBD
Jumlah		Rp	78.774.903.607,00	

Dari data diatas dapat disimpulkan secara rinci rencana kerja Sekretariat DPRD :

Indikator Kinerja Utama SKPD adalah sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Program – Program :

1. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 1.1 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
 - 1.1.1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - 1.1.2 Pembahasan Rancangan Perda
 - 1.1.3 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- 1.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - 1.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS
 - 1.2.2 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - 1.2.3 Pembahasan APBD
 - 1.2.4 Pembahasan Perubahan APBD
 - 1.2.5 Pembahasan Laporan Semester
 - 1.2.6 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
- 1.3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - 1.3.1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - 1.3.2 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 1.3.3 Pelaksanaan Reses

- 1.4 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - 1.4.1 Penyusunan Kode Etik
 - 1.4.2 Pengawasan Kode Etik DPRD
- 1.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - 1.5.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - 1.5.2 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - 1.5.3 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - 1.5.4 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - 1.5.5 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
 - 1.5.6 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
 - 1.5.7 Pengawasan Penggunaan Anggaran
 - 1.5.8 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 1.6 Peningkatan Kapasitas DPRD
 - 1.6.1 Pendalaman Tugas DPRD
 - 1.6.2 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 1.6.3 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 1.6.4 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 1.6.5 Penyusunan Program Kerja DPRD
- 1.7 Fasilitasi Tugas DPRD
 - 1.7.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPR
 - 1.7.2 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 1.7.3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 1.7.4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD
 - 2.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 2.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 2.4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 2.4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan/Material
 - 2.4.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 2.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 2.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 2.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2.7 Layanan Keuangan dan Administrasi DPRD
 - 2.7.1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 2.7.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 2.7.3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 2.8 Layanan Administrasi DPRD
 - 2.8.1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 Kondisi Umum Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto Capaian kinerja pada Tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran, sebagai berikut :

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	70	70,16	tercapai 100,22%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat DPRD adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target Interval nilai sampai dengan Nilai 70 pada tahun 2021 dan mampu tercapai nilai 70,16 dengan prosentase 100,22%.

Dari angka indeks tersebut diketahui bahwa target yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD ditahun 2021 telah terpenuhi.

Perolehan angka indeks 70,16 tersebut diuraikan sebagai berikut :

- Nilai rata-rata FASILITAS UMUM 53 dengan interpretasi Fasilitas Umum perlu ditingkatkan.
- Nilai rata-rata FASILITAS RUANG RAPAT 63,00 dengan interpretasi pelayanan sudah baik tapi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata FASILITAS RUANG KERJA/ FRAKSI sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata FASILITAS MAKANAN DAN MINUMAN sebesar 63 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata FASILITAS ANGGARAN sebesar 56,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- Nilai rata-rata FASILITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) sebesar 54,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

- (7) Nilai rata-rata FASILITAS PERSONAL sebesar 52,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- (8) Nilai rata-rata FASILITAS KEGIATAN sebesar 50,5 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.
- (9) Nilai rata-rata FASILITAS INFORMASI sebesar 49,33 dengan interpretasi perlu ditingkatkan kualitasnya.

1. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir

Kondisi Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	-	64,16	65,04	65,53

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto tahun 2021

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Capaian Kinerja Tahun 2018-2020 adalah indeks kepuasan masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 65,53. Dan pada tahun 2021 capaian indikator kinerja Sekretariat DPRD meningkat dengan dengan nilai 70,16. Realisasi ini meningkat dikarenakan adanya peningkatan dalam hal pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD melalui beberapa kemudahan-kemudahan fasilitasi diantaranya adalah dengan adanya aplikasi dewan yang berbasis elektronik sehingga memudahkan Pimpinan dan Anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

2. Kondisi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

No	Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target dalam Renstra	Realisasi	Capaian
1	2	3	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai IKM	70	70,16	tercapai (100,22%)

3. Membandingkan Realisasi kinerja Tahun 2021 dengan Standart Nasional (tidak ada)
4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kekagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pada beberapa tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi kinerja Tahun 2021 pada Sekretariat adalah BAIK dengan Target BAIK sehingga target tercapai. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- Adanya struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- Adanya dukungan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Solusi yang telah dilakukan :

- pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam banmus DPRD
- Pembuatan aplikasi untuk mempermudah komunikasi dengan dewan dan masyarakat

5. Analisa Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditunjang oleh sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan. Pada Tahun 2021 terdapat sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidang dan keahliannya juga tersedianya sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung tercapainya target kinerja. Sarana dan prasarana yang memadai diantaranya adalah adanya kendaraan dinas dan ruang rapat yang representatif. Jumlah anggaran belanja langsung Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2021 setelah perubahan adalah sebesar Rp 78.774.903.607,00 dengan penyerapan anggaran sebesar 67.025.747.627,00 atau sebesar 85,09%. Hal ini menginterpretasikan bahwa Sekretariat DPRD mampu melaksanakan efisiesi dalam pencapaian kinerjanya. Dalam hal sumber daya keuangan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis	Uraian Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			%Capaian Indikator Kinerja yang $\geq$ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1		2	5	6	7
1.	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	100	85,09	14,91%

6. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAHUN 2021

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG	INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
10.	Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	Sekretariat DPRD	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	Program Layanan Bagian Umum	Persentase Penyerapan Anggaran							-
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	20.000.000		9 dok	9 dok			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang Tersusun	10.000.000	9.825.000	3 dok	3 dok	Tidak diserap karena sesuai kebutuhan	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi tersusun	10.000.000	9.875.000	6 dok	6 dok	Tidak diserap karena sesuai kebutuhan	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran perangkat daerah	4.538.946.432		100%	100%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	4.538.946.432	3.102.017.178	14 bln	14 bln	Sudah diberikan sesuai aturan	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN	500.000.000		80	86			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai yang Terpenuhi	0		0	0	-	-	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Workshop ASDEKSI yang Diikuti ASN sesuai Tupoksi	500.000.000	421.491.090	7 kegiatan	8 kegiatan	Terdapat sisa belanja perjalanan dinas karena tidak semua menggunakan tiket pesawat	Diupayakan mendapat jadwal terkait waktu dan lokasi Bimtek dari pihak penyelenggara	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai kebutuhan	3.959.664.000		100%	100%			
				Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Pengadaan	3.000.000.000	2.953.298.600	1 paket	1 paket	Sudah selesai	Sudah sesuai	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor					dilaksanakan	target	
					Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket pengadaan Alat Tulis Kantor	99.664.000	78.767.000	1 paket	1 paket	Sesuai dengan kontrak	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000	192.128.000	1 paket	1 paket	Sesuai dengan kontrak	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Pengadaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	8.234.386	1 paket	1 paket	Sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi kunjungan tamu	300.000.000	215.780.000	12 bln	12 bln	Sisa Anggaran tidak terserap dikarenakan Volume anggaran kegiatan menyesuaikan datangnya Kunjungan Tamu ke kantor DPRD Kabupaten Mojokerto melalui Surat yg diterima, sesuai realita Kunjungan Tamu	Menyesuaikan kedatangan tamu	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	350.000.000	321.668.174	12 bln	12 bln	Karena biaya Medical Chec Up tidak diserap	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	1.024.123.040		100%	100%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik	480.000.000	393.904.373	12 bln	12 bln	Tergantung penggunaan/tagihan	akan disesuaikan dengan tagihan	



IO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	544.123.040	459.494.748	12 bln	12 bln	Sudah terlaksana	akan disesuaikan dengan kebutuhan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	1.099.194.000		100%	100%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	592.998.000	350.213.539	24 unit	24 unit	Mobil pimpinan masih baru Tingkat kerusakan ringan dan masih dapat free oli 2 tahun	akan disesuaikan dengan kebutuhan	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik (Penyediaan Jasa kebersihan Kantor) dan Peralatan Kerja yang Terpelihara	190.000.000	139.780.674	12 bln	12 bln	Sisa dari lelang Cleaning Service, Penawaran rendah	akan disesuaikan dengan	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Waktu Pemeliharaan Gedung Kantor sampai Berfungsi Baik	316.196.000	87.860.000	12 bln	12 bln	Gedung masih baru belum ada perbaikan	akan disesuaikan dengan kebutuhan	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD terfasilitasi	34.446.278.135		90%	92%			
					Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.981.278.135	27.669.477.538	14 bln	14 bln	Sudah diberikan sesuai aturan	-	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas sesuai Ketentuan yang Tersedia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	380.000.000	324.663.000	150 stel	150 stel	Sesuai dengan kontrak	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
					Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Mendapat Pelayanan General Check Up	85.000.000	53.075.000	50 org	39 org	Karena Anggota DPRD ada yang sudah Check Up mandiri	Perencanaan ke depan akan dilakukan sesuai kebutuhan	
					Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Waktu Layanan Administrasi DPRD	670.000.000						
					Fasilitasi Rapat Koordinasi dan	Jumlah Waktu Fasilitasi Rapat DPRD	670.000.000	645.999.500	12 bln	12 bln	Kegiatan sudah terlaksana	akan disesuaikan	



IO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Konsultasi DPRD						sesuai jadwal	dengan kebutuhan	
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang disahkan							
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah dokumen Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD terfasilitasi	6.777.422.000		13 dokumen	13 dokumen			
					Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Program Rancangan Perda yang Dibahas	450.750.000	435.308.294	1 dok	1 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Efektivitas penggunaan anggaran	
					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen Raperda yang Dibahas	4.278.400.000	4.195.315.123	8 dok	8 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Efektivitas penggunaan anggaran	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen Naskah Akademik yang Disusun	2.048.272.000	1.840.558.577	4 dok	4 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Tidak perlu tambahan di PAK	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah dokumen Kebijakan Anggaran dibahas	5.838.788.000		6 dokumen	6 dokumen			
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang dibahas	818.408.000	701.000.863	1 dok	1 dok	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan dengan waktu pembahasan, efisiensi dan anggaran	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang dibahas	468.024.000	345.795.890	1 dok	1 dok	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan dengan waktu pembahasan, efisiensi dan anggaran	
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD yang Dibahas	3.294.544.000	3.050.377.512	1 dok	1 dok	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan dengan waktu pembahasan, efisiensi dan anggaran	
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan yang Dibahas	1.182.000.000	891.493.372	1 dok	1 dok	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan dengan waktu pembahasan, efisiensi dan anggaran	
					Pembahasan Laporan Semester	Jumlah dokumen Laporan APBD yang Dibahas per	0	0	0	0		-	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Semester							
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Dibahas	1.162.572.000	1.021.916.774	1 dok	1 dok	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan dengan waktu pembahasan, efisiensi dan anggaran	
						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.104.004.000		96 kegiatan	89 kegiatan			
						Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.102.768.000	1.037.101.477	24 kegiatan	22 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Kegiatan harusnya lebih dilaksanakan ke daerah yang jarang dilaksanakan	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	900.000.000	618.802.878	12 kegiatan	10 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.098.768.000	1.080.045.414	24 kegiatan	24 kegiatan	Sisa Anggaran pada Medical Check Up Rapid Test tidak terserap dikarenakan belum terdapat tolok ukur biaya rapid test pada retribusi rumah sakit (masih gratis)	akan dikoordinasikan dengan penyedia rapid test	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	710.000.000	558.754.081	12 kegiatan	13 kegiatan	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan anggaran disesuaikan dengan waktu pembahasan anggota DPRD pelaksanaan mengambil lump sum 30% (efisiensi anggaran)	
						Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	650.000.000	613.321.951	12 kegiatan	12 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Efektivitas penggunaan anggaran	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen Temuan BPK dan Rekomendasi BPK yang Diawasi	0	0	0	0			
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Kegiatan atau Proyek APBD yang Diawasi	638.768.000	597.023.202	12 kegiatan	8 kegiatan	Sudah selesai pembahasan		
					Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan LKPJ yang Dibahas	1.003.700.000	1.003.589.210	1 dok	1 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
						Persentase pemenuhan hak DPRD sesuai peraturan	12.709.724.000			84,37%			
					Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD terfasilitasi	3.793.922.000		6 kegiatan	6 kegiatan			
					Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan	2.190.786.000	2.119.606.670	6 kegiatan	6 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Kegiatan medical check up tidak bisa terserap	
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Waktu Publikasi dan Dokumentasi yang Diterbitkan	760.000.000	660.063.500	12 bln	12 bln	Sisa Anggaran tidak terserap dikarenakan volume pelaksanaan publikasi pers tidak tercukupi waktu dan menyesuaikan penerimaan pertayang setiap bulan advetorial, iklan serta pembiayaan abonemen surat kabar.	akan lebih dimaksimalkan pada pelaksanaan volume kegiatan	
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan	150.000.000	69.700.000	20 OK	20 OK	Raperda inisiatif DPRD dan usulan raperda eksekutif terlambat dlam pembahasannya dan terlambat dalam penetapannya	Perencanaan harus disesuaikan dengan program pembahasan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang Disediakan	175.000.000	71.400.000	70 OK	42 OK	Raperda inisiatif DPRD dan usulan raperda eksekutif terlambat dalam pembahasannya dan terlambat dalam penetapannya	Perencanaan harus disesuaikan dengan program pembahasan	
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah dokumen Program Kerja DPRD yang Disusun	518.136.000	453.289.278	1 dok	1 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat terfasilitasi	2.140.500.000		3 kegiatan	3 kegiatan			
					Kunjungan kerja dalam daerah	Jml kunjungan kerja dalam daerah	10.000.000	9.920.000	25 kegiatan	25 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang tersusun	0	0	0	0	Sudah dialihkan sejumlah 150 jt sesuai DPA 150 jt.	-	
					Pelaksanaan Reses	Jumlah kegiatan reses terseda	2.130.500.000	2.054.190.000	3 kegiatan	3 kegiatan	Sisa Anggaran tidak terserap dikarenakan biaya dan pelaksanaan dilapangan menyesuaikan situasi dan kondisi serta terdapat 1 (satu) anggota Dewan yg tidak mengikuti kegiatan (karena meninggal dunia)	Kegiatan mendatang akan lebih maksimal jika dilakukan oleh 50 anggota dewan selama 3x kegiatan Reses	
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD terfasilitasi	354.800.000		24 kegiatan	9 kegiatan			
					Penyusunan kode etik	Juml dokumen kode etik terbentuk	0	0	0	0	Sudah selesai pembahasan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG / SUB KEG		INDIKATOR PROG/KEG/ SUB KEG	DANA PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	REALISASI PROG/KEG/ SUB KEG (Rp.)	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasa kode etik	354.800.000	270.578.563	24 kegiatan	9 kegiatan	Sudah selesai pembahasan	Perencanaan disesuaikan waktu pembahasan/efisiensi anggaran	
					Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Tugas DPRD terfasilitasi	6.420.502.000		73 kegiatan	84 kegiatan			
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terfasilitasi	3.217.882.000	2.903.342.721	20 kegiatan	18 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Meminimalkan kegiatan kunjungan dalam daerah	
					Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah dokumen Laporan Kinerja DPRD yang Tersusun	297.622.000	291.979.864	1 dok	1 dok	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Pelaksanaan Tugas Banmus yang Terfasilitasi	495.086.000	483.934.094	5 kegiatan	5 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	-	
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Tugas Pimpinan DPRD yang Terfasilitasi	2.409.972.000	2.209.785.519	48 kegiatan	61 kegiatan	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan	Kegiatan Hearing disesuaikan dengan rencana	



Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto melalui 2 (dua) program dan (dua puluh satu) kegiatan dengan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan alokasi anggaran sebesar Rp 78-774.903.607 dan terealisasi sebesar Rp 67.025.747.627 atau 85,09%

Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja prgram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya Kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Sewkretariat DPRD Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan

Kegiatan :

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 98,25%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 98,75%
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 68,34%
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan:
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 84,30%
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 98,44
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 96,06
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 82,34
 - Penyediaan bahan/ material 79,03
 - Fasilitas Kunjungan Tamu 71,93%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 91,91%
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 82,06%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 84,45%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 59,06%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 73,57%
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27,79%



- g) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 81,43%
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 85,44%
 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 62,44%
- h) Layanan Administrasi DPRD
 - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 96,42%

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pencapaian kinerja prgram Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah terfasilitasinya semua tugas da fungsi DPRD sehingga tercapai target kinerja persentase Perda yang disahkan dan terpenuhinya hak DPRD sesuai peraturan

Kegiatan :

- a) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD. Dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 96,57%
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 98,06%
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan / Keterangan dan / atau Naskah Akademik 89,86%
- b) Pembahasan Kebijakan Anggaran. Dengan sub kegiatan
 - Pembahasan KUA dan PPAS 85,65%
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 73,88%
 - Pembahasan APBD 92,59%
 - Pembahasan APBD Perubahan 75,42%
 - Pembahasan Laporan Semester 0%
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 87,90%
- c) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 94,05%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 68,76%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 98,30%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 78,70%
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 94,36%
 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 0%
 - Pengawasan Penggunaan Anggaran 93,46%
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 99,99%

- d) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Bimbingan Teknis DPRD 96,75%
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan 86,85%
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 46,47%
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 40,80%
 - Penyusunan Program Kerja DPRD 87,48%
- e) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Kunjungan Kerja Dalam Daerah 99,20%
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 0%
 - Pelaksanaan Reses 96,42%
- f) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Pengawasan Kode Etik DPRD 76,26%
- g) Fasilitasi Tugas DPRD
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 90,23%
 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 98,10%
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 97,75%
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 91,69%

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.825.000,00	98,25
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	9.875.000,00	98,75
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	4.538.946.432	3.102.017.178,00	68,34

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000	421.491.090,00	84,30
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000.000,00	2.953.298.600,00	98,44
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	200.000.000,00	192.128.000,00	96,06
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	8.234.386,00	82,34
	Penyediaan Bahan/Material	99.664.000,00	78.767.000,00	79,03
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	300.000.000,00	215.780.000,00	71,93
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	321.668.174,00	91,91
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000,00	393.904.373,00	82,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	544.123.040,00	459.494.748,00	84,45
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	592.998.000,00	350.213.539,00	59,06
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	139.780.674,00	73,57
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.196.000,00	87.860.000,00	27,79

7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.981.278.135,00	27.669.477.538,00	81,43
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	380.000.000,00	324.663.000,00	85,44
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	85.000.000,00	53.075.000,00	62,44
8	Layanan Administrasi DPRD			
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	670.000.000,00	645.999.500,00	96,42
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD			
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	450.750.000,00	435.308.294,00	96,57
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4.278.400.000,00	4.195.315.123,00	98,06
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	2.048.272.000,00	1.840.558.577,00	89,86
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
	Pembahasan KUA dan PPAS	818.408.000,00	701.000.863,00	85,65
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	468.024.000,00	345.795.890,00	73,88
	Pembahasan APBD	3.294.544.000,00	3.050.377.512,00	92,59
	Pembahasan APBD Perubahan	1.182.000.000,00	891.493.372,00	75,42
	Pembahasan Laporan Semester	0,00	0,00	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.162.572.000,00	1.021.916.774,00	87,90
3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1.102.768.000,00	1.037.101.477,00	94,05

	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	900.000.000,00	618.802.878,00	68,76
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.098.768.000,00	1.080.045.414,00	98,30
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	710.000.000,00	558.754.081,00	78,70
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	650.000.000,00	613.321.951,00	94,36
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0,00	0,00	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	638.768.000,00	597.023.202,00	93,46
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.003.700.000,00	1.003.589.210,00	94,05
4	Peningkatan Kapasitas DPRD			
	Bimbingan Teknis DPRD	2.190.786.000,00	2.119.606.670,00	99,99
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	760.000.000,00	660.063.500,00	96,75
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150.000.000,00	69.700.000,00	86,85
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	175.000.000,00	71.400.000,00	46,47
	Penyusunan Program Kerja DPRD	518.136.000,00	453.289.278,00	40,80
5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.000.000,00	9.920.000,00	87,48
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0,00	0,00	
	Pelaksanaan Reses	2.130.500.000,00	2.054.190.000,00	99,20
6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
	Penyusunan Kode Etik DPRD	0,00	0,00	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	354.800.000,00	270.578.563,00	96,42
7	Fasilitasi Tugas DPRD			

	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.217.822.000,00	2.903.342.721,00	76,26
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	297.622.000,00	291.979.864,00	90,23
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	495.086.000,00	483.934.094,00	98,10
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.409.972.000,00	2.209.785.519,00	97,75

Sumber : LRA Sekretariat DPRD Kab. Mojokerto, Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan di tahun 2020 dan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk perencanaan di tahun berikutnya.

Sasaran strategis yang hendak dicapai adalah meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran DPRD sesuai dengan fungsinya dengan indikator kinerja utama Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan target yang ditetapkan di tahun 2021 sebesar 70.

Hasil pengukuran IKU dimaksud berdasarkan unsur sebagaimana disebutkan dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 diperoleh angka capaian kinerja Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi dan mendukung kinerja DPRD pada tahun 2021 sebesar 70,16 (100,22% dari target) dengan interpretasi bahwa pelayanan telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya.

Mojokerto, Pebruari 2022

**SEKRETARIS DPRD
KAB. MOJOKERTO**

Drs. BAMBANG WAHYUADI, MH.,
Pembina Utama Muda
NIP. 1967 198903 1 009

